

Konflik Sudan dan Jatuhnya Rezim Presiden Omar Bashir

Wahiduddin

UIN Sunan Kalijaga

e-mail: wahiduddingaffar01@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji terkait bagaimana konflik Sudan terjadi dan dampak dari peristiwa tersebut membuat rezim presiden Omar Bashir yang menjabat selama 30 tahun akhirnya jatuh. Konflik Sudan telah menjadi salah satu peristiwa yang membuat dunia internasional merasa empati atas konflik yang terjadi di negara tersebut. Kepemimpinan presiden Omar Bashir dianggap otoriter dan tidak mampu membawa perubahan yang berarti bagi rakyat Sudan. Maka, rakyat dan militer berusaha menumbangkan tampuk kekuasaan presiden Omar Bashir untuk selama-lamanya. Artikel ini berusaha mengeksplorasi konflik Sudan dan implikasinya menyebabkan turunya Omar Bashir dari jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan mengumpulkan data-data dari pelbagai literatur, jurnal, buku dan berita yang terkait dengan konflik Sudan dan turunya presiden Omar Bashir dari kekuasaannya. Adapun hasil penelitian ini yakni konflik Sudan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh presiden Omar Bashir dan akhirnya ia pun harus meletakkan jabatannya sebagai presiden Sudan.

Keywords: *Konflik Sudan; Rezim Otoriter; Presiden Omar Bashir*

1. Pendahuluan

Konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memang selalu menjadi permasalahan yang serius. Konflik dapat diartikan sebagai kondisi adanya pertentangan atau ketidakcocokan antara beberapa pihak, baik individu, kelompok, atau organisasi (Glasl, 2002), dimana para pihak tersebut berusaha untuk saling menggagalkan tercapainya tujuan dari pihak lain (Folger, Polle dan Stutman, 1993). Konflik menjadi salah satu fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat dan kebanyakan bersifat merusak. Berdasarkan data dari SIPRI (2015), konflik menjadi masalah yang serius dan mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2000-an hingga sekarang. Peristiwa konflik memang beragam dan berbeda-beda dari pelbagai alasan dan penyebab. Konflik utamanya sering terjadi di wilayah Afrika dan Timur Tengah. Menurut Global Peace Index, di beberapa kawasan Afrika termasuk dalam negara yang tidak aman, misalnya Somalia (3,368) dan Sudan Selatan (3,397).

Secara garis besar, ada dua etnis yang mendiami Sudan, yakni etnis Arab dan etnis Afrika. Jumlah etnis Afrika cenderung lebih banyak dibandingkan etnis Arab. Tetapi, etnis Arab lebih mendominasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bahkan lebih memihak kepada etnis Arab. Hal tersebut berdampak pada pembagian wilayah misalnya, etnis Arab bermukim di daerah Sudan utara yang lebih subur. Selain itu, pendapatan dari eksplorasi minyak di wilayah selatan pun digelontorkan untuk pembangunan di wilayah utara. Oleh karena itu, muncullah konflik antara dua etnis tersebut atas perlakuan tidak adil tersebut. Selain itu, perang saudara pertama kali terjadi ketika suku Anya-Nya di Sudan bagian selatan yang mayoritas didiami oleh etnis Afrika penganut Kristen dan animisme melawan pemerintah Sudan pada tahun 1956. Perang tersebut berakhir tahun 1972 saat ditandatangani Addis Ababa Agreement. Perjanjian itu menghasilkan daerah otonomi khusus di Sudan bagian selatan.

Kelompok pemberontak kembali muncul di Darfur dengan nama Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A) dan Justice and Equality Movement (JEM). Kelompok ini menginginkan sumber daya dan perlakuan yang adil dari pemerintah. Sedangkan pemerintah Sudan membuat pasukan tandingan untuk menghadapi SPLM/A dan JEM. Pasukan ini bernama Janjaweed yang terdiri dari suku nomaden Arab Rizeigat, Misseriya dan Abbala yang dijanjikan oleh pemerintah Sudan.

Atas dasar konflik tersebut, untuk menghentikan konflik antara kelompok pemberontak dan Janjaweed, dalam hal ini presiden Chad, Idris Deby menjadi salah satu mediator antara kedua pihak dalam perundingan gencatan senjata selama 45 hari pada tahun 2003. Namun akhirnya perjanjian ini gagal. Kemudian, Uni Afrika pun atas permintaan SPLM/A menjadi mediator dalam perundingan kembali tahun 2004 untuk membahas gencatan senjata dan

masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Darfur. Kedua pihak menandatangani Darfur Peace Agreement pada tahun 2006, tetapi hanya pihak SPLM/A MM yang sepakat menandatangani perjanjian tersebut.

Berdasar atas hal itu, maka pihak SPLM/A AW tidak mau menandatangani Darfur Peace Agreement karena pembagian kekuasaan dan kompensasi yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang mereka minta. Konflik yang berkepanjangan telah berlangsung hingga akhirnya Sudan selatan merdeka dari Sudan lewat referendum pemisahan diri tahun 2011. Namun, pasca Sudan selatan merdeka dari Sudan, konflik terus berlanjut antara kedua negara. Sudan People's Liberation Army (SPLA) menyeberang ke Sudan dan militer Sudan melakukan pengeboman desa-desa di perbatasan. Bahkan konflik antara Sudan dan Sudan selatan mengarah pada perang antara kedua negara (Ottaway dan El-Sadany, 2012). Maka dari hal tersebut timbul pertanyaan mengapa masih terjadi konflik antara Sudan dan Sudan selatan setelah adanya referendum pemisahan diri Sudan selatan dari Sudan? Untuk itu perlu penelusuran mendalam untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu, apa yang melatarbelakangi turunnya presiden Omar El-Bashir dari jabatannya? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan membahas dan mengkaji bagaimana sebab rezim Omar El-Bashir jatuh pasca menjabat sebagai presiden selama tiga dekade tersebut.

2. Kajian Pustaka

2.1. Konflik dan Hegemoni

Peristiwa konflik dan tumbangnya presiden dari kursi kepemimpinannya memang menjadi dua hal yang sering terjadi dalam suatu negara. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa konflik menjadi salah satu alasan mengapa seorang presiden atau pemimpin negara turun dari jabatannya. Selain itu, dalam penelitian ini dari proses konflik hingga tumbangnya presiden Omar al-Bashir menjadi kajian yang harus ditelusuri secara mendalam. Maka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori konflik dan hegemoni. Sebab, keduanya menjadi sebab akibat atas suatu permasalahan tertentu, dalam hal ini terkait konflik Sudan dan implikasinya berakibat tumbangnya presiden Omar Bashir.

Menurut pandangan Ralf Dahrendorf bahwa semua perubahan sosial yang dialami manusia merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Dahrendorf sangat yakin bahwa konflik dan pertentangan menjadi bagian-bagian hidup masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip yang mendasari adanya teori konflik yaitu konflik sosial dan perubahan sosial yang selalu tersedia di dalam struktur kehidupan masyarakat. Kajian mengenai teori konflik jika dilakukan pendalaman, bisa memberikan kejelasan mengenai kemiskinan.

Kemiskinan juga melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik, perubahan ini terbentuk karena masyarakat miskin akan berupaya melakukan sesuatu hal yang bisa meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan konflik yang terjadi di Sudan, disebabkan adanya perebutan kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki oleh Sudan utara dan Sudan selatan. Sehingga, terjadinya ketimpangan antara Sudan utara dan Sudan selatan karena faktor ekonomi.

Kondisi ini jika terjadi secara terus menerus akan menyebabkan masyarakat berada dalam kesenjangan sosial yang lebih tinggi, selama itu pula konflik akan terjadi dalam kehidupan masyarakat karena berdasarkan faktor ekonomi dan perebutan antara status kaya dan miskin. Tingginya angka pengangguran dalam masyarakat menyebabkan tingginya angka kriminalitas, sehingga upaya penyelesaian ini terjadi karena lapangan kerja tidak tersedia atau karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak sesuai dengan pendapatan yang dihasilkannya. Teori konflik Dahrendorf juga bisa diperdalam melalui politik yang memberikan penguasaan serta mempertahankan kekuasaan yang diinginkan. Politik yang ada didalam pemerintahan menjadi sumber konflik yang paling ditakuti, karena hal ini akan memicu adanya konflik dalam segi kehidupan sosial lainnya, baik ekonomi, hukum, dan lainnya.

Hegemoni dapat diartikan sebagai dominasi sebuah kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar dan bersifat moral, intelektual serta budaya. Menurut Lukes, kekuatan setidaknya memiliki dua dimensi. Dimensi pertama aliran yang disebut sebagai “plurasi” atau dalam bidang Hubungan Internasional disebut sebagai “neorealis” dimana memahami power sebagai suatu yang dapat dibuktikan serta dapat dikuantifikasikan (Comor, 2008). Aliran kedua fokus pada suatu tujuan untuk menetapkan suatu aturan main. Perspektif ini sering diasosiasikan dengan teori institusionalis liberal secara umum bertujuan membuat aturan seperti perdagangan serta aturan legal lainnya yang berhubungan antar negara. Analisis Gramsci menjadi penting dalam wacana hegemoni yang berkembang saat ini. Gramsci berusaha melakukan analisis terhadap struktur ekonomi, politik, dan ideologi. Gramsci melakukan studi tentang konsekuensi reformasi ekonomi neoliberal dan fokus dengan mensyaratkan kekuatan sebagai pemegang struktur ekonomi dan hubungan antar kelas.

Hegemoni dalam sudut pandang Gramsci adalah sebuah usaha untuk menguasai suatu negara melalui struktur ekonomi dan politik. Dengan representasi negara kuat dan membentuk aliansi negara, maka dominasi negara maju akan terjadi (Roccu, 2013). Menurut pandangan

Mearsheimer perilaku negara-negara terbentuk oleh struktur anarki internasional. Sistem anarki memaksa negara-negara untuk bersaing demi kekuatan hingga negara-negara berupaya mencari hegemoni dan lebih agresif. Tujuan suatu negara seperti Amerika Serikat adalah untuk mendominasi seluruh sistem, karena dengan cara itu ia dapat meyakinkan bahwa tidak ada negara lain atau gabungan negara yang bahkan akan berpikir untuk berperang melawan Amerika Serikat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan mengumpulkan data-data dari pelbagai literatur, jurnal, buku dan berita yang terkait dengan konflik Sudan dan turunnya presiden Omar Bashir dari kekuasaannya

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Konflik Sudan

Konflik Sudan menjadi salah satu konflik krusial bagi dunia internasional. Konflik antara Sudan selatan dan Sudan utara ini membuat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) juga harus ikut andil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pasalnya konflik ini telah merenggut banyak korban. Secara kronologis, konflik Sudan disebabkan pertikaian antara suku Anya-Nya di bagian selatan dengan pemerintah Sudan pada tahun 1956 hingga diadakannya Addis Ababa Agreement pada 1972. Tetapi, perjanjian ini hanya berlangsung sampai tahun 1983 dan saat presiden Ja'far Nimeiri memberlakukan politik Arabisasi dan Islamisasi di Sudan bagian selatan. Suku asli yang tinggal di daerah Sudan selatan, utamanya di Kordofan selatan, seperti suku Nuba di Nil Biru, suku Ingessana dan suku Uduk menjadi korban dari politik tersebut.

Pemerintah Sudan menambang minyak dan mineral di daerah Kordofan selatan, Nil Biru dan beberapa daerah di wilayah selatan untuk membangun Sudan bagian utara. Bahkan, pada tahun 1965 penduduk Sudan bagian selatan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pemilu. Saat Omar al-Bashir dilantik menjadi presiden pada 1989, beliau menginginkan Sudan untuk menjadi negara Islam dan akhirnya penduduk Sudan bagian selatan yang bukan penganut Islam menolak rencana tersebut.

Konflik Sudan tepatnya terjadi di daerah Darfur yakni antara SPLM/A dan JEM dengan Janjaweed yang menyebabkan kejahatan kemanusiaan berart terjadi. SPLM/A dan JEM menuntut hak mereka sebagai warga negara Sudan untuk diperlakukan secara adil dalam bidang ekonomi dan politik. Selain itu, Janjaweed mulai melakukan upaya pembersihan etnis di Darfur bagian selatan pada Oktober 2002. Mereka membunuh laki-laki, memperkosa perempuan dan

menculik anak-anak. Menurut pemaparan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Colin L. Powell mengatakan bahwa telah terjadi genosida di Darfur dan dalam hal ini pemerintah Sudan dan Janjaweed berkomitmen untuk merespon hal tersebut dan boleh jadi masih akan terus terjadi (Totten dan Markusen, 2006).

Konflik antara Sudan dengan pihak SPLM/A dan JEM sudah beberapa kali menandatangani perjanjian damai, yakni gencatan senjata selama 45 hari yang dilakukan di kota Abeche pada 2003 yang diprakarsai oleh Idriss Deby, presiden Chad. Namun perjanjian itu gagal karena pihak SPLM/A dan JEM tidak sepakat dan mengingkari perjanjian tersebut. Uni Afrika membantu perundingan senjata di Chad, penandatanganan *The Agreement on the Modalities for the Establishment of the Casfire Commission and Deployment of Observers* di Addis Ababa pada Mei 2004. Tidak hanya itu, mereka juga telah menandatangani perjanjian *Comprehensive Peace Agreement* pada 9 Januari 2005, penandatanganan *Declaration of Principle* pada Mei 2005 yang ditandatangani oleh pihak pemerintah Sudan, SPLM/A dan JEM, dan penandatanganan *Darfur Peace Agreement* di Abuja pada Mei 2006, dimana perjanjian tersebut ditandatangani hanya dari pemerintah Sudan dan SPLM/A MM.

Proses referendum pemisahan diri Sudan selatan berdasar pada *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* yang ditandatangani oleh *National Congress Party (NCP)* dan SPLM/A untuk menghentikan perang dari tahun 1980-an. CPA ini merupakan penegasan dari *Intergovernmental Authority on Development-mediated Declaration of Principle* dan memiliki prinsip penentuan nasib sendiri demi terlaksananya perdamaian di Sudan. CPA memiliki waktu dalam jangka enam tahun sejak Juli 2005. Selama masa berlakunya CPA, maka kedua pihak melakukan kesepakatan untuk mendirikan *Government of National Unity* dengan presentasi kursi kepemimpinan, yakni 52% NCP, 28% SPLM/A dan pihak lainnya 20% (*European Union Election Observation Mission, 2011*). Sedangkan, Sudan bagian selatan mendapatkan otonomi khusus dengan dibuatnya *Government of Southern Sudan* yang dipimpin oleh John Garang (Temin dan Woocher, 2012) dengan pembagian masing-masing sebesar 70% untuk SPLM/A, 15% untuk NCP dan partai lainnya.

Referendum pemisahan diri Sudan selatan menjadi peristiwa penting dalam perjalanan politik Sudan. Pasalnya referendum ini sangat menentukan nasib Sudan wilayah selatan, apakah tetap masuk dalam negara Sudan atau bakal membangun negara sendiri. Referendum ini didasarkan pada *Comprehensive Peace Agreement*. Setelah itu, tahun 2009 dibuat *Referendum Act* yang memiliki fungsi sebagai bahan acuan dalam melaksanakan referendum. Berdasarkan

Referendum Act, referendum valid hanya jika jumlah vote setidaknya 60% dari voter memilih untuk merdeka (The Carter Center, 2011).

Referendum pemisahan diri Sudan bagian selatan telah diatur oleh Southern Sudan Referendum Commission yang merupakan lembaga independen yang berbasis di Khartoum dan Southern Sudan Referendum Bureau yang merupakan anak dari Southern Sudan Referendum Commission yang berbasis di Juba. Referendum dilaksanakan pada 9 Januari 2011 hingga 15 Januari 2011 dan hasil referendum diumumkan secara resmi pada 7 Februari 2011 dengan hasil 97,58 % dari 3.947.676 voter menginginkan bahwa Sudan selatan ingin merdeka dari Sudan. Sudan selatan resmi menjadi negara baru pada 9 Juli 2011 dengan nama resmi Republic of South Sudan, yakni tepat 6 tahun pasca berlakunya CPA .

Pasca Sudan selatan merdeka, konflik masih berlanjut di kedua negara. Yang pertama adalah terkait konflik minyak. Sebenarnya memang Sudan tidak menyukai kemerdekaan Sudan selatan karena ladang minyak berada di wilayah selatan. Perusahaan minyak yang masih di Sudan hanya Petro Energy dan Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC), sedangkan perusahaan minyak yang aktif di Sudan selatan yakni Petrodar, GNPOC, dan White Nile Petroleum Operating Company (WNPOC) atau Thar Jath.

Sudan selatan membutuhkan pipa minyak milik Sudan untuk mengekspor minyaknya melalui Port Sudan. Biaya penggunaan pipa minyak ini menjadi salah satu aspek yang menjadi sebab perselisihan antara Sudan dan Sudan selatan. Sudan meminta biaya sekitar US\$ 32 dan Sudan selatan meminta US\$ 1. Sebab kedua yakni konflik perbatasan, pembahasan mengenai perbatasan kedua negara terutama terjadi di wilayah Kordofan Selatan, Nil Biru, dan kota Abyei yang masih belum final. Kedua negara juga saling menuduh mendukung aktivitas pemberontak di masing-masing wilayah negara. Ketiga, yakni konflik internal di Sudan selatan antara presiden Salva Kiir dan mantan wakil presiden Rick Machar.

Konflik Sudan selatan terjadi karena Machar secara terbuka menantang kepemimpinan Kiir yang belum bisa membawa Sudan selatan kearah yang lebih baik lagi. Pasca Kiir memecat Machar, militer terbagi menjadi dua bagian, yakni tentara yang loyal dengan Machar dan mereka yang royal kepada Kiir. Salva Kiir menyalahkan Riek Machar atas terjadinya konflik Sudan selatan. Ia menuduh bahwa Riek Machar berusaha untuk melakukan kudeta pada dirinya. Upaya untuk menghentikan konflik, yakni ditandatanganinya Compromise Agreement on the Resolution of the Conflict in the South Sudan dengan bantuan dari Intergovernmental Authority on Development. Namun perjanjian tersebut dilanggar oleh pihak SPLM/A dengan mengambil paksa bahan bakar dan peralatan yang dibawa oleh UNMISS dengan melewati

sungai Nil dan menahan 19 orang tentara UNMISS dan 13 orang awak kapal. Sebab keempat yakni kondisi negara Sudan yang lemah karena dipimpin oleh pemimpin yang sama dari sejak tahun 1980-an dan masyarakat Sudan merasa kurang puas atas kinerja pemerintah Sudan.

Konflik di Sudan juga terjadi di daerah Kordofan selatan dan Nil Biru. Konflik ini terjadi karena SPLM/A yang mendirikan barak militer di kedua wilayah tersebut dilucuti senjatanya secara paksa oleh pihak pemerintah Sudan pada Juni 2011. Peristiwa tersebut memicu terjadinya konflik di Kadugli, ibu kota Kordofan selatan antara SPLA dan Sudan Armed Force (SAF) yang akhirnya menyebar. Konflik ini juga dipicu oleh terpilihnya kembali Ahmed Haroun sebagai gubernur, padahal beliau adalah salah satu target International Criminal Court atas kejahatan kemanusiaan berat di Darfur (Human Right Watch, 2012). Pada saat terjadi konflik, pasukan Sudan melakukan pengeboman lewat udara dan menembaki penduduk tanpa mempedulikan mana kombatan dan non kombatan. Maka, hal tersebut menyebabkan banyak penduduk lokal menjadi korban. Penduduk lokal juga mengalami penderitaan yakni kekurangan air, makanan, layanan kesehatan dan menjadi internally displaced persons.

Upaya untuk menghentikan konflik di Sudan, kedua pihak menandatangani Framework Agreement on Political and Security Arrangements for Southern Kodofan and Blue Nile yang berdasar pada prinsip demokrasi CPA. Namun perjanjian ini ternyata tidak diimplementasikan oleh pemerintah Sudan yang melakukan pengiriman militernya untuk menurunkan gubernur terpilih Nil Biru dan para stafnya. Sudan kembali memaksa tentara di Nil Biru untuk melucuti senjatanya dan peristiwa ini akhirnya kembali memicu konflik. Sebelum Sudan selatan merdeka, masyarakat Sudan bagian selatan merasa pemerintah Sudan hanya memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Sudan utara, meskipun ladang minyak kebanyakan berada di wilayah selatan sehingga saat Sudan selatan merdeka, mereka merasa telah terlepas dari penjajah. Masa awal kemerdekaan Sudan selatan, produksi minyak Sudan selatan sempat terhenti karena belum ada kesepakatan biaya pipa minyak. Sedangkan, Sudan tidak menyukai kemerdekaan Sudan selatan karena dianggap mengurangi pemasukan minyak negara, yakni 2/3 kilang minyak Sudan berada di daerah Sudan selatan. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Sudan meminta biaya senilai US\$ 32 per barel, yakni termasuk biaya transit, transportasi, proses dan penggunaan pelabuhan (Kamau dan Schneidman, 2012).

4.2. Jatuhnya Rezim Presiden Omar Bashir

Pemimpin Sudan Omar al-Bashir yang terbukti paling brutal dalam kepemimpinannya akhirnya tidak mampu mempertahankan kekuasaannya setelah 30 tahun berkuasa. Tidak sampai berbulan-bulan protes meletus atas al-Bashir, akhirnya ia kehilangan dukungan dari komandan

militernya yang berbelok menangkap dan menggulingkannya pada Kamis (11/4/2019). Menteri Pertahanan Jenderal Awad Mohamed dalam pengumuman penggulingan atas al-Bashir, menggambarkan dia sebagai sosok "keras kepala dan gigih". Hal itu terlihat ketika dia didakwa oleh Mahkamah Pidana International (ICC) di tahun 2009 atas tuduhan tindak kriminal di Darfur.

Al-Bashir menanggapi tuduhan tersebut dengan mengusir sekelompok bantuan yang bekerja di wilayah perang yang mengakibatkan 300.000 orang tewas dan 2,7 juta orang diusir dari rumah mereka oleh milisi yang dia dukung. Kemudian, dia melakukan perjalanan ke sana, dan muncul di tengah-tengah demonstrasi yang diorganisir pemerintah dengan dukungan penuh dan berbicara. Sejak kemerdekaan pada tahun 1956, Sudan telah terombang-ambing antara riuh rendah kekacauan politik partai dan pemerintahan militer. Namun, al-Bashir sukses merepresentasikan dirinya sebagai pemimpin generasi baru "Politik Islam" yang berbasis aliansi antara Islamis dan militer. Setelah memimpin kudeta militer pada tahun 1989 bersama beberapa rekan perwira, al-Bashir menerapkan hukum Syariah Islam termasuk rajam dan amputasi sebagai hukuman. al-Bashir juga pernah mengirim para hakim Islam ke negara yang masih berbasis animisme Christian selatan, yang akhirnya memicu perang saudara yang berlangsung puluhan tahun.

Salah satu sekutunya, Hassan Turabi pun pernah mengundang Osama bin Laden pada tahun 1991. Hal tersebut mendorong AS untuk menempatkan Sudan di daftar hitam negara-negara yang mensponsori terorisme. AS kemudian menjatuhkan sanksi pada pemerintah Sudan dengan melakukan serangan udara terhadap pabrik yang katanya digunakan Al-Qaida untuk memproduksi gas syaraf. Namun, al-Bashir membantah dakwaan tersebut dan menyalahkan tetangganya yang bermusuhan. Ia memanggil Bin Laden sebagai seorang pebisnis yang mengerjakan proyek infrastruktur besar di Sudan. Selain mengandalkan ideologi Islam, al-Bashir menggunakan kekayaan minyak negara tersebut untuk meningkatkan kelas pengusaha yang setia kepadanya dan menciptakan milisi setia untuk melindungi pemerintahannya. Ia mempekerjakan mereka untuk menumpas pemberontak di wilayah Darfur Barat negara. Kekejaman tersebut tak pelak menyebabkan tuduhan adanya genosida. Setelah bertahun-tahun berjanji untuk menyatukan negaranya di tengah perselisihan dengan negara kaya minyak di selatan, al-Bashir malah dengan cepat menerima hasil referendum pada tahun 2010 yang menciptakan salah satu negara baru, Sudan Selatan. Sementara dikritik, al-Bashir berharap mendapatkan konsesi dari Barat sebagai imbalan.

Ketika kesulitan ekonomi terasa semakin dalam setelah perpecahan dengan Sudan Selatan, protes yang terinspirasi oleh pemberontakan Musim Semi di Arab akhirnya pecah pada awal 2012. Omar al-Bashir pada awalnya mengejek protes tersebut, dengan mengatakan: "Mereka berbicara tentang Musim Semi Arab. Biarkan saya memberi tahu mereka bahwa di Sudan kita memiliki musim panas yang terik, musim panas yang membara yang membakar musuh-musuhnya. Kemudian, ketika protes berlanjut, dia berjanji untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan ulang, hanya untuk mengingkari dan mencalonkan diri pada 2015.

Setelah 30 tahun, pemerintahan Omar al-Bashir berakhir dengan cara yang hampir sama dengan bagaimana pemerintahannya dimulai. Presiden Sudan itu merebut kekuasaan dalam kudeta militer pada 30 Juni 1989, dan terus menjabat hingga 11 April 2019, ketika ia digulingkan dan ditangkap oleh angkatan bersenjata. Al-Bashir telah dibawa ke tempat yang aman, Jenderal Awad Ibn Auf mengatakan dalam pidatonya pada Kamis (11/4) sore, setelah menyatakan penggulingan rezim. Tetapi kejatuhan al-Bashir disebabkan oleh ribuan masyarakat Sudan dari semua lapisan, yang turun ke jalan selama empat bulan untuk menuntut diakhirinya pemerintahan pria berusia 75 tahun itu.

Demonstrasi tersebut—yang diselenggarakan oleh para dokter, guru, dan pengacara, beberapa di antaranya—meletus karena kenaikan harga makanan, sebelum beralih ke tuntutan yang lebih luas untuk perubahan politik—puncak dari kemarahan selama bertahun-tahun atas korupsi dan penindasan yang telah berlangsung lama. Puluhan orang telah tewas dalam kekerasan terkait protes tersebut, sejak dimulainya demonstrasi pro-demokrasi. Selama masa jabatannya, al-Bashir memimpin Sudan melalui beberapa konflik dan menjadi buronan oleh pengadilan kejahatan perang internasional karena dugaan kekejaman di Darfur. Dia juga orang terakhir yang memimpin Sudan yang bersatu, sebelum kemerdekaan Sudan Selatan pada tahun 2011.

Al-Bashir dilahirkan di keluarga petani pada tahun 1944, di Hosh Wad Banaqa, Sudan Utara, yang hingga kemerdekaannya pada tahun 1955 adalah bagian dari Kerajaan Mesir dan Sudan. Setelah menyelesaikan sekolah menengah di ibu kota, Khartoum, ia mendaftarkan diri di akademi militer di Mesir pada tahun 1960. Pada tahun 1973, ia adalah bagian dari unit-unit Sudan yang dikirim ke Mesir untuk berperang dalam perang Arab-Israel. Pada tahun 1975, ia diangkat sebagai atase militer di Uni Emirat Arab (UEA). Sekembalinya ke Sudan, ia diangkat menjadi komandan pangkalan militer, dan pada tahun 1981 ia menjadi kepala brigade parasut lapis baja. Pada pertengahan tahun 1980-an, ia memiliki peran sentral dalam kampanye angkatan bersenjata di Sudan selatan dalam perang sipil melawan pemberontak Tentara

Pembebasan Rakyat Sudan. Sebagai seorang kolonel di militer Sudan, al-Bashir berada dalam posisi yang baik untuk memimpin kudeta militer pada tahun 1989 melawan Sadiq al-Mahdi, Perdana Menteri dari pemerintah yang terpilih secara demokratis.

Al-Bashir kemudian ditunjuk sebagai Ketua Pusat Komando Revolusioner untuk Keselamatan Nasional (RCC), yang didirikan sebagai sebuah pemerintah transisi. Setelah bersekutu dengan Hassan al-Turabi—Ketua Parlemen Sudan dan Kepala Front Islam Nasional—al-Bashir membubarkan parlemen, melarang partai-partai politik, dan terus memperkenalkan hukum Islam. Sudan selatan yang sebagian besar penganut animisme dan Kristen, menolak pengenalan sistem hukum yang baru, dan perang sipil utara-selatan yang berlangsung puluhan tahun pun semakin intensif. Polisi Sudan menembakkan gas air mata ke kerumunan demonstran anti-pemerintah di Khartoum setelah penyelenggara menyerukan demonstrasi nasional terhadap Presiden Omar al-Bashir .

Pada tahun 1993, al-Bashir menghapuskan RCC dan menunjuk dirinya sendiri sebagai Presiden Sudan, namun tetap mempertahankan kekuasaan militer. Tiga tahun kemudian, Sudan mengadakan pemilihan presiden dan parlementer, dan al-Bashir—yang mencalonkan diri sepenuhnya sebagai presiden—menang dengan 75 persen suara. Dia kemudian pada akhirnya melegalkan pendaftaran partai politik pada tahun 1999. Pada akhir tahun 1999, al-Bashir menyingkirkan Turabi—yang semakin dekat dengan kelompok-kelompok politik Muslim yang tidak populer di Barat—dari jabatannya sebagai Ketua Parlemen dan memenjarakannya. Pada tahun 2000, al-Bashir terpilih kembali setelah memenangkan 90 persen suara rakyat dalam pemilu yang digambarkan sebagai kebohongan oleh oposisi.

Al-Bashir adalah satu-satunya kepala negara yang didakwa melakukan kejahatan perang. Ia dan beberapa menteri senior dalam kabinetnya telah dikritik karena apa yang disebut oleh PBB sebagai "pembersihan etnis" di provinsi barat Darfur—rumah bagi sejumlah suku non-Arab yang memberontak terhadap pemerintah pada tahun 2003. Suku-suku Darfur menuduh pemerintah al-Bashir berpihak pada suku-suku Arab dalam perjuangan puluhan tahun atas sumber daya yang langka di provinsi tersebut. PBB memperkirakan bahwa antara 200 ribu hingga 400 ribu orang telah tewas dalam konflik tersebut, dan 2,7 juta orang terlantar. Tetapi pemerintah al-Bashir mengklaim bahwa PBB—yang dipengaruhi oleh negara-negara Barat—telah melebih-lebihkan jumlahnya. Pada Juni 2008, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) menuduh Bashir melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehubungan dengan serangan yang sedang berlangsung terhadap kelompok-kelompok etnis non-Arab Darfur. ICC sejak itu mengeluarkan dua surat perintah penangkapan terhadapnya.

Meskipun terdapat surat perintah penangkapan, namun al-Bashir telah mengunjungi beberapa negara termasuk Suriah, Ethiopia, Libya, Qatar, Mesir, dan Afrika Selatan. Pada tahun 2010, al-Bashir terpilih kembali dengan sekitar 68 persen suara. Namun pihak oposisi menuduh adanya kecurangan, dan para pengamat pemilu mengatakan bahwa pemungutan suara itu tidak memenuhi standar internasional. Tahun berikutnya, warga Sudan Selatan sangat mendukung pemisahan dari Sudan utara dalam sebuah referendum, yang mengarah pada terbentuknya negara termuda di dunia itu. Pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011 membuat Sudan kehilangan sebagian besar pendapatan minyaknya, dan memicu inflasi yang melonjak serta kelangkaan yang meluas. Sebagai akibatnya, kelompok-kelompok oposisi dan masyarakat mulai mengungkapkan kemarahan mereka dengan ketidakmampuan pemerintah al-Bashir untuk mengatasi keluhan mereka, memperbaiki kondisi ekonomi, dan memperkenalkan reformasi politik.

Militer Sudan telah menggulingkan dan menangkap Presiden Sudan Omar al-Bashir, setelah berbulan-bulan protes terhadap kekuasaannya selama hampir 30 tahun. Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (11/4), Jenderal Awad Ibn Auf, Kepala Komite Keamanan Tertinggi—sebuah badan yang terdiri dari angkatan bersenjata, polisi, dan badan-badan keamanan lainnya—mengatakan bahwa al-Bashir telah dibawa ke tempat yang aman setelah "penggulingan rezim", dan juga mengumumkan pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin militer, yang akan memerintah selama dua tahun". Selama masa ini, angkatan bersenjata akan bertanggung jawab—dengan perwakilan terbatas dari elemen-elemen lain dari Komite tersebut—untuk mengelola negara dan mencegah pertumpahan darah warga Sudan yang tak ternilai harganya," kata Ibn Auf, Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan negara itu. Pengumuman itu memicu cemoohan para demonstran, yang menuduh militer melakukan kudeta atas rezim (Sudan), dan gagal memenuhi tuntutan mereka akan pemerintahan transisi yang dipimpin warga sipil.

Ibn Auf juga mengumumkan keadaan darurat selama tiga bulan dan penangguhan Konstitusi 2005, serta penutupan wilayah udara Sudan selama 24 jam dan penyeberangan perbatasan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Semua lembaga pemerintah Sudan—termasuk Majelis Nasional dan dewan menteri nasional—telah dibubarkan, Ibn Auf menambahkan, dan meyakinkan masyarakat bahwa Sudan akan segera mempersiapkan pemilu yang “bebas dan adil”. Militer juga memberlakukan jam malam malam di negara itu, yang akan dimulai sekitar pukul 22.00. Badan keamanan Sudan, sementara itu, mengatakan bahwa pihak berwenang akan

membebaskan semua tahanan politik. Dinas Keamanan dan Intelijen Nasional (NISS) tidak memberi tahu kapan pembebasan akan dilakukan.

Pengumuman Ibn Auf tersebut dilontarkan setelah enam hari berturut-turut protes anti-pemerintah di luar markas tentara Sudan di ibu kota, Khartoum. Para demonstran telah melakukan aksi massa di luar kompleks untuk menyerukan pasukan agar mendukung upaya mereka untuk membuat al-Bashir secara damai diturunkan dari kekuasaan. Namun, Sudanese Professionals Association (SPA)—yang menjadi ujung tombak protes tersebut—menolak langkah Ibn Auf dan menyebutnya sebagai “kudeta militer”, dan berjanji akan mengadakan demonstrasi lebih lanjut. SPA mengatakan dalam sebuah tweet, bahwa mereka menuntut “penyerahan kekuasaan kepada pemerintah transisi sipil yang mencerminkan kekuatan revolusi”.

Tetapi Hiba Morgan dari Al-Jazeera, yang melaporkan dari Khartoum, mengatakan bahwa "masa depan Sudan benar-benar berada di tangan Ibn Auf". "Sebagian besar anggota (dewan militer ini) adalah bagian dari partai (Kongres Nasional) yang berkuasa dan rezim lama... (tetapi) para pengunjuk rasa menginginkan pemimpin baru, pemimpin sipil, bukan militer," kata Morgan. Protes terhadap al-Bashir—yang mengambil alih kekuasaan pada tahun 1989 dan menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)—dimulai pada bulan Desember atas kenaikan harga roti, tetapi dengan cepat berubah menjadi seruan yang lebih luas baginya dan para sekutu politiknya untuk melepaskan jabatan mereka dan menyerahkan kekuasaan. Para kritikus menuduh pria berusia 75 tahun itu salah mengelola ekonomi Sudan, mengakibatkan tingginya harga pangan, kekurangan bahan bakar, dan kekurangan uang yang meluas.

Perwakilan dari gerakan perlawanan anti-pemerintah Girifna—yang telah membantu mengatur protes anti-pemerintah—mengatakan bahwa kelompok itu juga akan terus memprotes sampai tuntutan mereka untuk perbaikan politik terpenuhi, dan menggambarkan pengumuman Ibn Auf sebagai "tamparan di wajah"-nya. Jatuhnya al-Bashir menyusul penggulingan Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika bulan ini, yang juga terjadi setelah protes massal setelah tiga dekade berkuasa. Para pengamat mengatakan bahwa terdapat beberapa persamaan antara kekacauan politik di Sudan dan di Aljazair, serta di tempat lain di seluruh dunia Arab.

Para pemimpin militer dan sipil Sudan menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan di sebuah upacara menggembirakan di ibu kota Sudan, Khartoum, hari Sabtu (17/8), menandakan babak baru dalam kehidupan negara Afrika yang luas, yang telah diguncang oleh

delapan bulan protes massal, sebuah kudeta, dan tindakan keras militer berdarah. Tak banyak orang Sudan yang dapat membayangkan bahwa baru setahun yang lalu Omar Hassan al-Bashir, penguasa mereka yang dibenci selama 30 tahun, akan mendekam di penjara paling terkenal di Sudan sambil menunggu pengadilan atas tuduhan korupsi yang diperkirakan akan dimulai hari Senin, 19 Agustus 2019. Perayaan jalanan yang diiringi musik, puisi, dan kembang api diadakan di seluruh negeri hari Sabtu (17/8).

Di wilayah Afrika di mana banyak revolusi gagal atau menjadi bumerang dalam beberapa tahun terakhir, Sudan berharap menjadi pengecualian. Tetapi bagi banyak orang, euforia itu diliputi oleh kenyataan menyakitkan dari keruntuhan ekonomi negara itu dan kompromi yang sulit dari kesepakatan pembagian kekuasaan yang menjamin militer, yang dipimpin oleh beberapa deputi terdekat al-Bashir, akan mempertahankan cengkeramannya atas kekuasaan.

Tingkat konsesi yang disetujui oleh para revolusioner Sudan terlihat jelas pada upacara hari Sabtu (17/8) ketika Letnan Jenderal Mohamed Hamdan, komandan paramiliter yang pasukannya memimpin penumpasan brutal terhadap para demonstran di Khartoum pusat tanggal 3 Juni 2019, menandatangani perjanjian atas nama junta militer. Ahmed al-Rabia menandatangani atas nama koalisi oposisi utama, Pasukan Kebebasan dan Perubahan. Para pejabat asing yang menandatangani termasuk Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, yang membantu menyelamatkan pembicaraan pembagian kekuasaan setelah tindakan keras bulan Juni 2019 di mana sedikitnya 128 orang tewas.

Perjanjian yang ditandatangani hari Sabtu (17/8) membuka jalan bagi pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Abdalla Hamdok, seorang ekonom, untuk mengambil alih kekuasaan tanggal 1 September 2019. Pemerintahan baru menggantikan junta militer yang menggulingkan al-Bashir bulan April 2019 dan diperkirakan akan memerintah hanya untuk lebih dari tiga tahun, sampai pemilihan umum dapat diadakan. Militer yang telah mendominasi Sudan sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1956, tetap unggul dalam pemerintahan baru. Sementara Hamdok akan mengepalai administrasi teknokratis, kekuatan keseluruhan akan dipegang oleh dewan berdaulat yang dipimpin selama 21 bulan pertama oleh seorang petugas militer, Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan.

Selain itu, militer akan mengendalikan kementerian pertahanan dan dalam negeri, yang menyusun bagian besar dari pengeluaran nasional dan bertanggung jawab atas beberapa pelanggaran terburuk di bawah pemerintahan al-Bashir. Hari Sabtu (17/8), banyak orang Sudan siap merayakan setidaknya kemungkinan awal baru di negara yang mengalami kelaparan selama

puluhan tahun, konflik, dan pengucilan internasional di bawah pemerintahan al-Bashir. Dikutip dari The New York Times, Minggu (18/8), pemberontakan yang memuncak dalam penggulingan al-Bashir tanggal 11 April 2019 telah membangkitkan harapan kaum muda, terutama perempuan, yang ingin mengakhiri sistem pemerintahan Islamisnya yang keras. Pemberontakan itu memelihara harapan para pemberontak di wilayah bergolak seperti Darfur dan Pegunungan Nuba bahwa mereka mungkin akhirnya mencapai penyelesaian dengan pemerintah pusat.

Tetapi ketentuan perjanjian pembagian kekuasaan itu sendiri berlumuran darah setelah tindakan keras tanggal 3 Juni 2019 yang dipimpin oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) Jenderal Hamdan, sebuah unit paramiliter terkenal yang melancarkan serangan di Khartoum pusat dalam serangkaian penembakan dan pemerkosaan. Beberapa minggu kemudian, tubuh para demonstran yang tewas masih ditemukan di Sungai Nil, beberapa mayat terikat dengan blok beton di sekeliling mereka. Jenderal Hamdan sejak itu muncul sebagai tokoh yang paling kuat di Sudan, bahkan jika ia diungguli oleh Jenderal al-Burhan. Ketenaran Jenderal Hamdan menunjukkan bahwa ada prospek terbatas untuk pertanggungjawaban atas pelanggaran militer di masa lalu di bawah al-Bashir, atau bahkan untuk al-Bashir sendiri. Militer Sudan bersikeras bahwa al-Bashir tidak akan dikirim untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag di Belanda, di mana ia menghadapi dakwaan berusia satu dekade atas tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

Kesepakatan yang ditandatangani hari Sabtu (17/8) disaksikan oleh Presiden Salva Kiir dari Sudan Selatan yang tiba dengan topi hitam khasnya. Sudan Selatan memisahkan diri dari Sudan tahun 2011 untuk membentuk negara terbaru di dunia. Tetapi hanya sedikit perempuan yang hadir di aula, menggarisbawahi keluhan bahwa meski perempuan memainkan peran penting dalam pemberontakan terhadap al-Bashir, perempuan kurang terwakili atau diabaikan dalam pembicaraan pembagian kekuasaan selanjutnya. Abdelgalil dari Asosiasi Profesional Sudan (SPA) mengatakan bahwa setidaknya satu dari lima warga sipil di dewan berdaulat beranggotakan 11 orang diharapkan merupakan wanita. Dia berharap lebih banyak wanita akan melayani di pemerintahan. “Kita akan melihat dan menghitung ketika para menteri diumumkan,” kata Abdelgalil.

Pemerintahan baru Sudan mewarisi sebuah negara dalam keruntuhan ekonomi, dengan inflasi yang melonjak, kekurangan makanan, bahan bakar dan listrik, dan infrastruktur yang hancur yang menyebabkan sebagian besar wilayah Khartoum dibanjiri oleh hujan musiman dalam beberapa pekan terakhir. Kemaraahan publik atas kenaikan harga roti tiga kali lipat

memicu protes pertama terhadap al-Bashir bulan Desember 2018. Para ahli memperingatkan bahwa Sudan membutuhkan bantuan internasional yang mendesak untuk menstabilkan situasi ekonomi yang berbahaya dan menangkai kerusuhan lebih lanjut. Amerika Serikat memegang pengaruh signifikan dalam bentuk pelabelannya selama sudah puluhan tahun terhadap Sudan sebagai negara pendukung terorisme, status yang jika diangkat akan membuka ekonomi negara terhadap investasi. Namun banyak ahli khawatir bahwa pemerintah sementara Sudan yang baru akan menghadirkan para jenderal yang rakus dengan kesempatan baru untuk memperkaya diri dan para pendukung mereka.

Jenderal Hamdan dan para jenderal lainnya menghadapi tuduhan penyelundupan, perdagangan emas ilegal, dan bentuk-bentuk korupsi lainnya. Sentry, sebuah kelompok investigasi advokat hak dan pakar kebijakan yang melacak hasil kejahatan perang di Afrika, telah menyerukan setiap bantuan internasional ke Sudan untuk digabungkan dengan peningkatan tekanan untuk reformasi militer.

5. Kesimpulan

Berdasarkan konflik yang terjadi di Sudan menjadi salah satu konflik krusial bagi dunia internasional. Konflik antara Sudan selatan dan Sudan utara membuat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pasalnya konflik ini telah merenggut banyak korban. Selain itu, konflik yang berkepanjangan akan menimbulkan dampak yang besar bagi suatu negara, terutama terhadap masyarakat sipil.

Referendum pemisahan diri Sudan selatan juga menjadi peristiwa penting dalam perjalanan politik Sudan. Pasalnya referendum ini sangat menentukan nasib Sudan wilayah selatan, apakah tetap masuk dalam negara Sudan atau bakal membangun negara sendiri. Referendum ini didasarkan pada Comprehensive Peace Agreement. Berdasarkan pada referendum pemisahan diri Sudan bagian selatan diatur oleh Southern Sudan Referendum Commission yang merupakan lembaga independen yang berbasis di Khartoum. Maka upaya untuk menghentikan konflik di Sudan, kedua pihak akhirnya menandatangani Framework Agreement on Political and Security Arrangements for Southern Kodofan and Blue Nile yang berdasar pada prinsip demokrasi CPA.

Pemimpin Sudan Omar al-Bashir yang terbukti paling brutal dalam kepemimpinannya akhirnya tidak mampu mempertahankan kekuasaannya setelah 30 tahun berkuasa. Militer Sudan telah menggulingkan dan menangkap Presiden Sudan Omar al-Bashir. Para demonstran yang menginginkan al-Bashir juga menilai kediktatorannya harus segera diakhiri. Mereka menganggap apa yang dilakukan pemimpinnya selama berkuasa telah banyak menyakiti

perasaan rakyat Sudan dan mengorbankan banyak nyawa demi kelanggengan kekuasaan dirinya semata.

Sehingga, untuk menata masa depan Sudan sebaiknya kedua pihak antara oposisi dan dewan militer transisi segera mengagendakan penyusunan proses pemilihan umum yang dimenangkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan yang adil dan makmur bagi masyarakat Sudan adalah hal mutlak yang mesti dicapai. Kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang demokratis menjadi dambaan rakyat Sudan, agar tidak ada lagi ketimpangan ekonomi, konflik dan ketidakadilan di Sudan.

Referensi

- Anne W Kamau, dan Witney Schneidman. 2012. South Sudan: Resolving the Oil Dispute. 23 Maret. Diakses September 21, 2016. Friedrich Glasl. 2002. Conflict Management. Bern/Stuttgart: Paul Haupt Verlag.
- Edward A Comor. 2008. Consumption and the Globalization Project: International Hegemony and the Annihilation of Time, New York: Palgrave Macmillan. (20).
- European Union Election Observation Mission. 2011. Final Report: Southern Sudan Referendum 9-15 January 2011. Observasi, European Union.
- Human Right Watch. 2012. Under Siege : Indiscriminate Bombing and Abuses in Sudan's Southern Kordofan and Blue Nile States. Penelitian, Human Rights Watch.
- Joseph P Folger, Marshall S Poolle, dan Randall K Stutman. 1993. Working Through Conflict: Strategies for Relationships, Groups and Organizations. New York: Harper Collins College Publishers.
- Marina Ottaway, dan Mai El-Sadany. 2012. "Sudan: From Conflict to Conflict". Carnegie Endowment for International Peace i-31.
- Roberto Roccu. 2013. The Political Economy of the Egyptian Revolution: Mubarak Economic Reforms and Failed Hegemony. New York: Palgrave Macmillan. (18)
- Samuel Totten, dan Eric Markusen. 2006. Genocide in Darfur: Investigating Atrocities in the Sudan. New York: Routledge.
- The Carter Center. 2011. Observing the 2011 Referendum on the Self-Determination of Southern Sudan. Observasi, Atlanta: The Carter Center.
- <https://www.brookings.edu/opinions/southsudan-resolving-the-oil-dispute/>.
- <https://tirto.id/presiden-sudan-omar-al-bashir-dilengserkan-usai-berkuasa-30-tahun-dlXC>, diakses pada tanggal 28 Januari 2020.

<https://www.matamatapolitik.com/news-kudeta-militer-sudan-presiden-al-bashir-digulingkan-dan-ditangkap/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2020.

<https://serikatnews.com/demokratisasi-keharusan-masa-depan-sudan/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2020.

<http://dosensosiologi.com/teori-konflik-menurut-para-ahli-dan-contohnya-lengkap/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2020.